



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SURABAYA
UNIT KERJA : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IDA WIDAYATI
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 938901

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 4.015.194.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 218 m2/276 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 1.545.910.000
2. Tanah Seluas 109 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 242.184.000
3. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 1.847.000.000
4. Tanah Seluas 121 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 380.100.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 136.450.000

1. MOBIL, NISAN JUKE Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 127.500.000
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 4.300.000
3. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 4.650.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 42.800.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 2.028.323.132

F. HARTA LAINNYA

Rp. 520.000.000



Sub Total	Rp.	6.742.767.132
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	6.742.767.132

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.